

Bab Satu

PENDAHULUAN

*Suryane sampun surup, dina ne mangkin puput
Gelis rawuh peteng, anake sinamian
Muputang pekarian, saha liang tuhu seneng*

*Ajin titiang ring swargan, titiang matur panyuksma
Ring ayun Sang Aji, rehning ring dina niki
Setata ketulungin, antuk sih paswecan Aji*

*Anake sane sakit, titiang ngastawayang
Mangda kasegerang. Tur sane mangkin sungut
Madak Juru Panglipur, ngicen malih keliangan*

*Yening wenten ring salah, ring bawos mwah ring manah
Ngranjing kaiwangan, dumadak Sang Hyang Yesus
Sane darma tur putus, ledang ngicen pengampura*

*Mangda i kala buta, katundung antuk Ida
Saking umah titiang, manda tan wenten baya
Rikala titiang pules, kasayubih antuk Ida*

(lagu yang selalu dinyanyikan oleh warga Blimbingsari saat doa tutup hari)

Sesuai dengan hukum perubahan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan itu sendiri, oleh karena itu terjadinya transformasi sosial dan perekonomian tidak bisa ditolak. Transformasi termasuk perubahan pada level masyarakat desa yang merupakan fenomena 'natural' di masyarakat sosial.

Sejak lama pembangunan desa-kota digambarkan sebagai sebuah tata hubungan ekonomi domestik yang timpang. Desa telah menjadi obyek empuk bagi penghisapan surplus ekonomi kota yang menjadi pusat-pusat pembangunan. Dalam tulisannya Arief (1995)¹ berpendapat bahwa urbanisasi penduduk dari sektor pertanian di pedesaan berlangsung akibat adanya investasi dari sektor manufaktur dan jasa yang selama ini masih terfokus di kota/pusat. Ketika kegiatan

¹ Arief, S., 1995, "Neo-Kolonialisme", Makalah pada Seminar Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Sekretariat Bina Desa, di Jakarta, 3 Agustus 1995.

ekonomi kota memberikan tawaran imbalan lebih tinggi dari desa, maka penduduk desa berpindah ke kota, sehingga sektor pertanian relatif mengalami kelangkaan pekerja.

Seiring dengan itu, interaksi antar aktor-aktor ekonomi, maupun intra sektor, telah menambah keruh keadaan dengan adanya pengambilan keputusan politik yang tidak berpihak kepada rakyat di desa. Akibatnya, sektor pertanian, di mana sebagian besar orang kita menggantungkan hidupnya, jauh dari perannya sebagai fondasi pembangunan yang sesungguhnya.

Memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi haruslah menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tantangan perubahan kondisi eksternal dan internal yang terjadi menuntut kebijakan yang tepat dan matang dari para pembuat kebijakan dalam upaya pengembangan potensi wilayah pedesaan. Perubahan kondisi eksternal seperti perkembangan internasional diantaranya berhubungan dengan liberalisasi arus investasi dan perdagangan global menyebabkan potensi wilayah pedesaan tidak mendapat perhatian. Sedangkan yang bersifat internal, yaitu berkaitan dengan perubahan kondisi makro maupun mikro dalam negeri, yang meliputi transformasi struktur ekonomi, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan pangan, masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), Sumber Daya Manusia (SDM), lingkungan dan masih banyak lagi.

Arus globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan sumberdaya. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan. Dengan melihat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi, desa dipandang sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang menunjang keperluan pertanian, serta mengarahkannya secara lebih terpadu. Di bawah ini, penulis akan menjelaskan landasan teoritis

yang akan dipakai dalam menjelaskan transformasi dan beberapa hasil-hasil penelitian tentang transformasi.

Pembangunan dan Transformasi Sosial Ekonomi

Pembangunan dan perubahan sosial adalah topik yang terus dibahas. Tjokroamidjojo (2000:42), melihat pembangunan sebagai proses atau usaha-usaha perubahan sosial (*social change*). Dapat berarti juga suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang kurang baik menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya suatu usaha dan proses, dimana pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya (Khairuddin, 2000:24).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial multidimensional. Pembangunan mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat (Todaro, 2000; Soedjatmoko, 1983). Di bawah ini akan dijelaskan pandangan Rostow tentang pertumbuhan.

Teori Rostow (1960) tentang pertumbuhan pada dasarnya merupakan sebuah teori modernisasi dan pembangunan, di mana teori ini meyakini bahwa faktor manusia (bukan struktur dan sistem) menjadi fokus utama. Teori ini dikembangkan untuk membendung pengaruh sosialisme atau manifesto non-komunisme. Rostow melihat perubahan sosial yang disebutnya sebagai pembangunan sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pemikiran ini dijelaskan dengan rinci oleh Rostow dalam *the five-stage scheme*. Dalam teori ini dikatakan bahwa tahap pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lalu diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan

pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang disebut dengan masyarakat konsumerisme tinggi (*high mass consumption*). Bagaimana masyarakat modern yang dicita-citakan dapat tercapai, Rostow mengajukan persyaratan utamanya yakni tersedianya modal (Mansour Fakih, 2006).

Tokoh lain dalam teori modernisasi adalah David Mc Clelland (1984) yang berangkat dari perspektif psikologi sosial mengatakan bahwa dasar-dasar tentang psikologi dan sikap manusia sangat berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi. Mc Clelland (1984) lebih tertarik untuk melihat aspek pertumbuhan ekonomi dibandingkan pertumbuhan aspek budaya dalam perkembangan kebudayaan. Umumnya bertumbuhnya ekonomi selalu dijelaskan lebih sebagai faktor 'eksternal', tetapi bagi Mc Clelland, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor 'internal' yakni pada nilai-nilai dan motivasi yang mendorong seseorang mengeksplorasi peluang dan meraih kesempatan. Dalam penafsiran McClelland atas tesis Max Weber, jika etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Menurutnya, etika Protestan adalah *the need for achievement (N'ach)*.

Adam Smith (2005), mengungkapkan bahwa kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial serta pada dasarnya tidak bisa dipahami terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dimana proses ekonomi itu terjadi (bandingkan dengan Muller, 1992). Ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi bukan merupakan suatu proses ekonomi semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari transformasi atau perubahan sosial dan kebudayaan (Soedjatmoko, 1983). Ditambahkan bahwa, pembangunan itu selalu menyangkut perubahan persepsi dan sikap terhadap kehidupan secara menyeluruh, tidak di dalam bagian-bagian yang terpisah (bandingkan dengan Todaro, 2000). Oleh karena itu, setiap proses pembangunan ekonomi selalu menyangkut faktor multidimensi di dalamnya (Abdullah, 2002).

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa.

Teori pembangunan Chenery (2007) memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery (2007) tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu Negara yang berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya manusia (*human capital*).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal (*lag*) dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan *lag* inilah, maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, dari awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktivitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat dan memiliki produktivitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa transisi. Dengan demikian, produktivitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan.

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat,

sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota (French, Wendell L *et al*, (ed.) 2000). Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan.

William F. Ogburn (baca Moore, 2002) berusaha memberikan suatu gambaran tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial, bandingkan dengan Soemardjan yang mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.² Transformasi sosial ekonomi terlihat seperti peristiwa yang dramatis, revolusioner bagi mereka yang mengamati dari luar, tetapi orang-orang yang berada di dalamnya merasakannya seperti proses organik, kumulatif, yang pada awalnya sangat berat, tetapi setelah roda pengatur itu bergerak dari satu, lima, sepuluh dan seterusnya sampai seribu bahkan lebih maka menjadi terakumulatif. Transformasi sosial tidak pernah terjadi dalam sekali jalan, sehingga perubahan berikutnya tidak seberat di awal.

Sonnenberg (1994), menyatakan bahwa di dunia ini perubahan terjadi setiap hari, sehingga menjalankan upaya apapun bisa mengalami tendensi sukses atau gagal. Agar berhasil, entitas atau komunitas harus merangkul perubahan. Tidak cukup entitas tersebut hanya reaktif terhadap perubahan, entitas harus belajar mengantisipasi perubahan. Robbins (2007) menyatakan, entitas atau komunitas harus berubah. Kalau tidak berubah, entitas tersebut akan mati. Apa yang diutarakan Sonnenberg senada dengan Smither, Houston dan McIntire (1996) yang menyatakan bahwa semua entitas harus berubah agar dapat bertahan hidup. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa

²Soemardjan (1982).

perubahan yang terjadi dalam suatu entitas harus dirumuskan sedemikian rupa demi kepentingan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, setiap perubahan yang datang harus diantisipasi dan dikelola sebaik mungkin. Smither, Houston dan McIntire (1996) secara tegas menyatakan bahwa proses perubahan harus dikelola secara terampil agar perubahantersebut terjadi secara efektif demi kepentingan entitas atau komunitas dimaksud. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bateman dan Snell (2002), bahwa seluruh anggota masyarakat harus termotivasi untuk berubah. Jika tidak, tujuan perubahan tidak akan terwujud. Dalam kaitannya dengan konteks perubahan, Balogun dan Hailey (2004) merumuskan suatu model berupa kaleidoskop perubahan yang merupakan fitur-fitur atau aspek kontekstual yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan suatu perubahan.

Pada dasarnya, melakukan perubahan merupakan usaha memanfaatkan peluang mencapai keberhasilan. Karena itu melakukan perubahan mengandung risiko, yaitu adanya resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Dalam konteks ini Ahmed, Lim & Loh (2002) secara tegas menyatakan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah tindakan yang berbahaya dalam lingkungan yang penuh dengan ketidak-pastian. Resistensi terhadap perubahan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu resistensi individu dan resistensi kelompok. Resistensi individu artinya adanya penolakan individu (perseorangan) terhadap perubahan-perubahan walau perubahan-perubahan itu memanfaatkan peluang untuk kepentingan warga masyarakat desa, yang dilakukan oleh pemimpin. Sedangkan resistensi kelompok artinya bahwa adanya penolakan-penolakan dari kelompok-kelompok atau group warga masyarakat yang dilakukan oleh pengambil kebijakan atau pemimpin desa yang bersangkutan. Sebenarnya resistensi individu dan kelompok itu sama hanya berbeda pada aktor jumlahnya saja.

Transformasi yang berkelanjutan mengikuti pola yang dapat diperkirakan dari membina, dan mencari terobosan terhadap permasalahan. Seperti mendorong roda pengatur raksasa yang berat, diperlukan banyak usaha hanya untuk membuat roda itu bergerak,

tetapi kalau tetap teguh mendorong dalam arah yang sama, konsisten, dalam jangka waktu yang panjang, roda pengatur memperoleh momentum, akhirnya mencapai titik terobosan. Transformasi yang meliputi ekonomi, sosial dan budaya antara lain, melibatkan perubahan struktur, *initiator agent of change*, menuju kondisi yang lebih maju (*progress*).

Salah satu penelitian tentang proses transformasi pertanian dan perubahan sosial yang dilakukan oleh Slamet Widodo (2009) pada masyarakat Samin di Bojonegoro lebih mengacu kepada pembangunan atau modernisasi pada sektor pertanian. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa faktor material dan non material tidak dapat dipisahkan karena memiliki peranan penting dalam perubahan sosial atau transformasi masyarakat.

Hasil simpulan dari penelitian Slamet Widodo (2009) menjelaskan bahwa perubahan sosial masyarakat Samin disebabkan yang pertama, beralihnya masyarakat Samin dari pemeluk agama "Ageman Adam", menjadi pemeluk agama Islam yang juga disebabkan oleh tekanan pemerintah untuk memeluk suatu agama. Kedua, terjadinya modernisasi pertanian dengan penggunaan teknologi namun tidak menghilangkan kelembagaan gotong royong yang disebut dengan "sambatan" dimana kebutuhan tenaga kerja dalam bidang pertanian diperoleh dengan cara saling membantu antar rumah tangga petani secara bergiliran tanpa adanya sistem pengupahan. Ketiga, migrasi tenaga kerja yang dilakukan oleh generasi muda serta masuknya informasi melalui media masa sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Samin. Namun Slamet Widodo (2009) berpendapat bahwa pembangunan seharusnya tetap memperhatikan kearifan lokal dan mengkaji ulang model pembangunan ala modernisasi yang diidentikkan dengan *westernisasi*.

Penelitian tentang transformasi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman di Kalimantan yang dilakukan oleh Utomo dan Hutahuruk (2008)³, menunjukkan bahwa bagi masyarakat pesisir,

³Jurnal Borneo Administrator, 2008. *Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara*. Vol. 4, No: 3.

transformasi sosial yang diharapkan adalah adanya perubahan sosial dari masyarakat nelayan tradisional menjadi masyarakat industrialis yang kreatif, dinamis dan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di wilayah pesisir. Adanya perubahan-perubahan pola pikir mendorong terjadinya perubahan pada pola tindak. Masuknya pengaruh sosial, budaya dan teknologi ke dalam komunitas pesisir telah membantu percepatan terjadinya transformasi sosial.

Transformasi sosial yang bergerak maju pada perbaikan kualitas hidup akan diikuti dengan terjadinya transformasi ekonomi. Hal ini dapat terjadi disebabkan, kemajuan pola pikir dan pola tindak masyarakat pesisir akan mengalihkan peran sektor penangkapan ikan tradisional ke sektor industri. Hanya saja, untuk dapat terjadinya transformasi ekonomi di masyarakat pesisir yang masih dibutuhkan waktu yang relatif lama, karena perlu ditumbuhkan iklim investasi yang dapat memacu tumbuhnya sektor-sektor potensial non perikanan. Iklim investasi berkaitan dengan potensi sumber daya alam (sebagai penyedia bahan baku) dan kebijakan pemerintah yang sehat. Artinya disini bahwa untuk melakukan pergeseran dari sektor perikanan tradisional ke sektor industri diperlukan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memberi kepastian usaha dan jaminan kesejahteraan masyarakat pesisir (Lewig, K.A. & M.F. Dollard. 2001).

Dua penelitian yang dilakukan Widodo, Utomo (2008) dan Hutahuruk (2008), menunjukkan arah yang sama, dimana transformasi ekonomi sangat erat hubungannya dengan transformasi atau perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi akan menjadi valid apabila kondisi ekonomi telah menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran dan penurunan angka kemiskinan di masyarakat. Laju transformasi ekonomi antara tempat satu dengan lainnya berbeda-beda, yang disebabkan adanya perbedaan status kepemilikan dan potensi sumber daya alam yang tersedia, kualitas sumber daya manusia, proses kulturisasi, serta aglomerasi. Adanya perubahan-perubahan pola pikir mendorong terjadinya perubahan pada pola tindak.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Gunawan (2012), tentang perubahan sosial di Perdesaaan Bali, khususnya perubahan sosial di Tabola lebih mencirikan perubahan sosial yang bersifat dualitas dari komunitas Bali-Hindu. Dimana perubahan dualitas menyangkut elemen-elemen perubahan antara lain elemen struktur sosial (struktur subyektif dan obyektif), elemen penyebab atau sumber-sumber perubahan (eksogen dan endogen), arah perubahan (linier dan siklikal), serta elemen pendorong perubahan (struktur dan agen/agensi). Masing-masing pasangan elemen perubahan prosesnya berlangsung secara simultan dan tumpang tindih saling mempengaruhi, sehingga menghasilkan suatu gejala perubahan.

Disamping adanya sifat dualitas dalam elemen perubahan, juga dikemukakan adanya cara berpikir dualitas dalam diri individu dan masyarakat desa di Bali. Cara berpikir dualitas itu terwujud dalam suatu konsep yang dinamakan *Rwabhineda*, yang maknanya kurang lebih “dua yang berbeda tapi satu”. Konsep *Rwabhineda* ini dimunculkan oleh Mpu Kuturan dan digunakan sebagai konsep pemersatu terhadap keyakinan Hindu Bali yang semula terpecah-pecah atas banyak sekte. Dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh cara berpikir *Rwabhineda* tersebut bisa pula dikemukakan bahwa sesungguhnya masyarakat desa di Tabola pada khususnya dan di Bali pada umumnya, baik sebagai individu maupun kolektif adalah aktor-aktor atau agen-agen yang aktif yang penuh inisiatif dalam merespon dunia sosialnya.

Penelitian Gunawan (2012) lebih terfokus pada apa yang menjadi elemen-elemen terjadinya perubahan sosial pada masyarakat di perdesaan Bali dengan temuannya tentang perubahan sosial yang bersifat dualitas. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Saptana, Syahyuti dan Rosganda (2003) lebih menekankan bahwa harus terjadi transformasi kelembagaan untuk memperkuat ekonomi rakyat di pedesaan.

Saptana, *et al* (2003), dalam penelitiannya “transformasi kelembagaan guna memperkuat ekonomi rakyat di pedesaan dengan studi kasus di Kabupaten Tabanan Bali”, mengatakan bahwa rapuhnya perekonomian masyarakat dapat dilacak dari rapuhnya perekonomian

rakyat di pedesaan, yang penyebab utamanya adalah rapuhnya kelembagaan yang mendukungnya.

Dalam penelitian Saptana *et al* (2003) menemukan tiga tahap transformasi kelembagaan tradisional dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di pedesaan Bali. Pertama, tipe masyarakat komunal merupakan ciri yang universal ketika ketergantungan antar penduduk tinggi, dan campur tangan pihak luar rendah sekali. Salah satu cirinya adalah kepemilikan sumber daya secara bersama dan distribusi manfaatnya juga bersama-sama. Hal ini dapat dilihat dalam kelembagaan *Subak* dan *Banjar* dimana mereka sendiri yang memutuskan untuk membentuk kelembagaan yang dibutuhkan, mencakup di dalamnya bentuk atau strukturnya, mekanisme pemilihan anggotanya, pola kepemimpinannya, aturan main (*rule of the game*) serta sanksi-sanksinya.

Kedua, kelembagaan baru secara bersamaan diikuti dengan penghancuran kelembagaan tradisional yang dibangun di atas budaya dan semangat komunalitas (Kymlicka, Will, F Budi. 2003) seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD), beberapa kelompok tani, kelompok ternak, kelompok wanita tani, kelompok pencapir, kelompok Kadarkum, dan PKK. Namun di Bali, introduksi kelembagaan baru tidak diikuti dengan perusakan kelembagaan lama. Kelembagaan baru tetap diterima dan sejauh mungkin dijadikan "vitamin" penguatan lembaga lama atau menjadi pemanis lembaga yang sudah ada. Karena itu di Bali hingga sekarang ditemukan secara berdampingan lembaga Banjar Dinas dan Banjar Adat, Desa Dinas dan Desa Adat serta lembaga pengairan dan *Subak*. Sebenarnya yang terjadi di Bali tidak semuanya dinilai menguntungkan, namun bagi masyarakat Bali cara itulah yang dinilai paling sesuai; agar masyarakat adat tidak dinilai menentang kehendak pemerintah pusat, sementara itu kelembagaan adat masih bisa dijalankan dengan baik.

Ketiga, adalah tahap komunalitas baru. Pemerintah mulai beralih dengan pendekatan baru yang lebih menghargai komunalitas lokal (Hariadi K. dan Jhamtani, 2006). Peran kepemimpinan lokal

kembali direvitalisasi untuk lebih menjamin suksesnya pembentukan kelembagaan introduksi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Lembaga Permusyawaratan Desa (LPD).

Dari berbagai kajian atau tulisan yang telah dibahas sebelumnya, para penulis lebih banyak mengkaji pada perubahan sosial masyarakat Bali-Hindu (Gunawan, 2012), padahal di Bali itu ada juga Bali-Islam dan Bali-Kristen. Dan kajian tentang masyarakat minoritas di Pulau Bali masih jarang. Hampir semua kajian diatas lebih fokus pada masyarakat Bali-Hindu dan masih belum memberi perhatian pada masyarakat Bali-Kristen. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada transformasi/perubahan ekonomi pada komunitas Kristen Bali. Penulis menganggap bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian yang lainnya dimana dalam penelitian ini akan menekankan kepada 'transformasi sosial dan ekonomi pada komunitas Bali-Kristen'. Bali-Kristen perlu dikaji karena keunikannya seperti, pertama mereka memiliki sejarah "pembuangan" ke Jembrana dan mengelola lahan yang masih hutan rimba dikerjakan dan diusahakannya menjadi lahan produktif, menjadi lahan yang pada akhirnya mampu menggerakkan sektor pertanian, sektor perkebunan dan sektor peternakan dan tentunya tidak berhenti menjadi desa wisata (*tourism village*), kedua, mereka golongan minoritas yang jarang diteliti, yang ketiga karena walau mereka minoritas yang Bali-Kristen, mereka tetap menggunakan budaya Bali-Hindu (seperti Gambelan, Tudung payung, Bunga, Kamben, Udeng dan Slempot) di gereja saat beribadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya seperti penguburan warga Blimbingsari.

Masalah Penelitian Dalam penelitian ini, memfokuskan pada **Bagaimana transformasi Ekonomi Komunitas Blimbingsari** yang mampu menggerakkan unsur institusi gereja dan pihak pemerintah untuk melakukan perubahan dan pengembangan Desa Blimbingsari, dari desa yang miskin menjadi desa yang makmur (maju), untuk membangun semangat dan kinerja kewirausahaan dengan berkinerja pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, dan dengan dukungan infrastuktur desa yang berkembang, pada akhirnya menjadi

desa wisata melalui transformasi ekonomi kreatif. Penulis menurunkan permasalahan penelitian dengan tiga pertanyaan penelitian yang lebih empiris yaitu *Pertama*, Apa yang memicu komunitas Kristen Bali Berpindah ke Wilayah Baru? *Kedua*, Apa Yang Dilakukan Komunitas Kristen Bali Untuk Bertahan Hidup di Wilayah Baru? *Ketiga*, Bagaimana Proses Peralihan Desa Agraris ke Desa Wisata? Dengan kata lain pembelajaran apa yang mungkin bisa digali dari proses penelitian tentang transformasi terutama bila dihubungkan dengan perspektif konsep maupun teori transformasi atau perubahan ekonomi desa/komunitas.

Struktur Penulisan

Secara keseluruhan disertasi ini tersusun menjadi delapan bab yang menyajikan isi keseluruhan penelitian ini. Bab Satu penelitian ini merupakan pendahuluan yang mengupas tentang transformasi, perubahan (sosial dan ekonomi) baik dari beberapa hasil-hasil penelitian dan tinjauan pustaka, men-justifikasi mengapa memilih Blimbingsari, serta menentukan masalah dan persoalan penelitian.

Bab Dua merupakan uraian mengenai metode penelitian, dimana didalamnya berisi deskripsi singkat proses penelitian (berawal dari sebuah ketertarikan), menuju lokasi penelitian, pengumpulan data lapangan, transkrip dan sortir data, dan penulisan disertasi.

Bab Tiga merupakan uraian mengenai kemajuan Desa Blimbingsari. Didalamnya berisi tulisan tentang gambaran umum desa, kependudukan desa, pariwisata: seni dan budaya, awig-awig desa adat, balai desa, *enjungan* atau banjar, gereja mirip pura, namun bukan pura, dan ukiran bali di dinding gereja. Ekonomi kreatif menjadi desa wisata sebagai dampak transformasi ekonomi juga ditampilkan di bab empat ini serta pendapatan desa selama tahun 2009-2012. Disamping itu juga ada Kuri Agung sebagai tanda masuk suatu desa akan dijelaskan di bab tiga ini.

Bab Empat menjelaskan dari mayoritas menjadi minoritas yang terbuang. Melalui pendeskripsian ini dapat dilihat bagaimana sejarah migrasi, konversi dari Hindu ke Kristen, masalah tanah kuburan: awal migrasi, perpindahan menuju ke Blimbingsari, proses migrasi dan kesimpulan. Mengapa penulis menceritakan konversi agama, karena mereka yang melakukan konversi agama tersebut yang melakukan migrasi ke Blimbingsari.

Bab Lima menjelaskan tentang proses mengubah hutan menjadi lahan produktif dan pertanian. Melalui pendeskripsian ini dapat dilihat bagaimana alas *cekik* yang mengerikan, proses membuka hutan Blimbingsari, hasil untuk pemenuhan kebutuhan, proses membuka lahan pertanian, menjadi lahan produktif (sawah dan ladang), dan perluasan pemukiman, sampai mengembangkan sektor perkebunan dan sektor peternakan.

Bab Enam menjelaskan Blimbingsari menjadi desa wisata. Melalui pendeskripsian ini dapat dilihat bagaimana pembangunan infrastruktur desa: irigasi air "tepat guna", potensi menjadi desa wisata, pelatihan pariwisata, *trekking sket*, *tourism business plan* menggerakkan partisipasi warga, memperbaiki struktur *sekaa* (kelompok), menambah alat seni musik seperti *jegog* dan *gambelan* dan menetapkan upacara keagamaan termasuk didalamnya pemakaian *kamben* atau kain dan *udeng* (penutup kepala) serta memberi semangat jiwa kewirausahaan yang dapat memunculkan wirausaha baru sebagai dampak transformasi ekonomi di Blimbingsari.

Bab Tujuh menjelaskan proses dan dampak serta hasil transformasi sosial dan ekonomi di Desa Blimbingsari dari desa yang miskin menjadi desa yang maju dan makmur. Bab tujuh ini juga menjelaskan pergulatan antara teori dan empiris yang menghasilkan konsep-konsep dan menemukan suatu teori atau model tentang transformasi, pertumbuhan, ekonomi kreatif yang didorong oleh semangat kewirausahaan serta memberikan masukan kepada khasanah dunia usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Bab Delapan adalah bab kesimpulan. Dimana kesimpulan ini berisi benang merah antara bab-bab sebelumnya. Bab Delapan juga menjelaskan relevansinya terhadap studi pembangunan baik secara implikasi teoritis dan implikasi terapan serta sumbangan penelitian bagi pembangunan desa khususnya di Bali dan pembangunan desa di Indonesia pada umumnya.

